

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT TIONGHOA DI SURABAYA PADA MASA *WIJKENSTELSEL* TAHUN 1843-1918 (STUDI KASUS: KELUARGA HAN, THE, DAN TJOA)

Karina Adis Meilya

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: karina.22129@mhs.unesa.ac.id

Rojil Nugroho Bayu Aji

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: rojilaji@unesa.ac.id

Abstrak

Masyarakat Tionghoa di Surabaya merupakan salah satu kelompok Timur Asing yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi kota kolonial. Namun, pemberlakuan kebijakan *wijkenstelsel* oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1843–1918 membatasi ruang gerak dan interaksi sosial masyarakat melalui pemisahan pemukiman berdasarkan etnis. Kondisi tersebut tidak hanya menciptakan segregasi sosial, tetapi juga mendorong terbentuknya solidaritas internal di kalangan masyarakat Tionghoa. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih banyak membahas masyarakat Tionghoa dari aspek ekonomi, politik, dan perkembangan pecinan, sehingga kajian mengenai interaksi sosial internal masyarakat Tionghoa pada masa *wijkenstelsel* masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas penerapan *wijkenstelsel* di Surabaya, pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Tionghoa, serta bentuk interaksi sosial melalui keluarga besar dan marga dalam keluarga Han, The, dan Tjoa. Penelitian ini menggunakan metode sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian diperoleh dari arsip kolonial, *Staatsblad*, surat kabar, sumber visual, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *wijkenstelsel* tidak hanya membentuk segregasi spasial, tetapi juga memperkuat interaksi sosial internal masyarakat Tionghoa di Surabaya. Solidaritas sosial dibangun melalui hubungan keluarga besar, perkawinan antarmarga, kepemimpinan opsir Tionghoa, dan perkumpulan internal seperti *The Sie Siauw Yang Tjohbiauw*. Keluarga Han, The, dan Tjoa berperan sebagai elite Tionghoa yang memperkuat jaringan sosial dan mempertahankan solidaritas komunitas sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan kolonial.

Kata Kunci: Interaksi sosial, *Wijkenstelsel*, Masyarakat Tionghoa, Surabaya kolonial, Keluarga Han-The-Tjoa.

Abstract

The Chinese community in Surabaya played an important role in the economic development of the colonial city. However, the implementation of the wijkenstelsel policy by the Dutch East Indies government from 1843 to 1918 restricted the mobility and social interaction of the community through ethnically segregated residential areas. This condition not only created social segregation but also encouraged the formation of strong internal solidarity among the Chinese community. Previous studies have generally focused on the economic, political, and architectural aspects of Chinese society, while studies concerning the internal social interactions of the Chinese community during the wijkenstelsel period remain limited. Therefore, this study examines the implementation of the wijkenstelsel in Surabaya, its impact on the social life of the Chinese community, and the forms of social interaction through extended family and clan networks among the Han, The, and Tjoa families. This research employs the historical method, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used consist of colonial archives, Staatsblad, newspapers, visual sources, interviews, and relevant literature studies. The findings reveal that the wijkenstelsel not only created spatial segregation but also strengthened the internal social interactions of the Chinese community in Surabaya. Social solidarity was maintained through extended family relations, inter-clan marriages, the leadership of Chinese officers, and internal associations such as The Sie Siauw Yang Tjohbiauw. The Han, The, and Tjoa families played significant roles as Chinese elites who strengthened social networks and maintained community solidarity as a form of adaptation to colonial policies.

Keywords: Social Interaction, *Wijkenstelsel*, Chinese Community, Colonial Surabaya, Han-The-Tjoa Families.

PENDAHULUAN

Surabaya sebagai kota pelabuhan yang sedang berkembang sebanding dengan kota pelabuhan Asia lainnya seperti Kalkuta, Rangoon, Singapura, Bangkok, Hong Kong, dan Shanghai pada abad ke-19.¹ Perkembangan Surabaya sebagai kota pelabuhan menarik kedatangan berbagai kelompok etnis, termasuk masyarakat Tionghoa yang memiliki peran penting dalam bidang perdagangan dan perekonomian kolonial sebagai pedagang perantara, pengusaha, hingga pemegang *pacht* dalam sistem ekonomi kolonial. Keberadaan masyarakat Tionghoa di Surabaya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat berdasarkan kategori rasial. Dalam sistem tersebut masyarakat Tionghoa ditempatkan sebagai golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) yang berada di bawah golongan Eropa dan di atas pribumi.²

Politik kolonial Belanda secara sengaja menerapkan pemisahan rasial sejak abad ke-19 sehingga ruang interaksi antargolongan semakin menyempit. Hubungan yang sebelumnya terbuka berubah menjadi semakin terkendali karena kebijakan tersebut mempertegas batas-batas sosial di antara kelompok penduduk. Upaya pengendalian tersebut tampak dalam penataan struktur kota kolonial ketika pemerintah Hindia Belanda membagi kawasan kota bawah (*Beneden stad*) Surabaya ke dalam sejumlah kluster pemukiman untuk memudahkan pengawasan terhadap pendatang dari berbagai etnis. Aturan ini tertulis dalam kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yaitu *wijkenstelsel* yang diberlakukan pada tahun 1835 dan kemudian diperkuat dengan surat edaran *Raad van Indie* No. 850 yang dimuat dalam lembar negara 1842 lampiran No. 525 yang menyebutkan bahwa pemukiman penduduk pribumi dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) di dalam kota harus dipisahkan dengan hunian orang Eropa.³ Aturan tersebut mengharuskan setiap kelompok bermukim di wilayahnya masing-masing yang telah ditentukan pemerintah kolonial sehingga mobilitas etnis-etnis di Surabaya menjadi sangat terbatas. Selain itu, masyarakat yang tidak mematuhi aturan seperti tidak mendaftarkan diri atau tidak membawa kartu *passenstelsel* dalam perjalanan akan dikenakan hukuman atau denda sebesar 10 gulden.⁴

Penerapan *wijkenstelsel* menjadikan kawasan pecinan sebagai ruang sosial tersendiri bagi masyarakat Tionghoa di Surabaya. Kebijakan ini menciptakan segregasi sosial berupa pemisahan ruang permukiman berdasarkan kategori etnis yang membatasi interaksi masyarakat Tionghoa dengan kelompok penduduk lainnya. Sistem ini dirancang pemerintah kolonial sebagai sarana pengawasan dan kontrol sosial terhadap penduduk Timur Asing.⁵ Dalam konteks Surabaya, bagian timur sungai Kali Mas menjadi kawasan pemukiman masyarakat Tionghoa

yang kemudian dikenal sebagai Kampung Cina (*Chinese Camps*) meliputi Slompretan, Tepekongstraat, Tjaipostraat, Bongkaran, *Chinesche Voorstraat*, Bibisstraat, Pasar Bong, hingga Handelstraat atau Kembang Jepun.⁶ Di tengah kondisi tersebut, hubungan timbal balik yang terjalin melalui kontak dan komunikasi antarsesama anggota komunitas Tionghoa berlangsung secara intens dalam kehidupan sehari-hari. Kawasan pecinan berkembang tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai ruang terbentuknya interaksi sosial melalui hubungan keluarga besar, ikatan marga, perkawinan, maupun berbagai perkumpulan sosial. Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut kemudian membentuk solidaritas internal yang kuat sehingga masyarakat Tionghoa mampu mempertahankan identitas dan kohesi sosial mereka di tengah sistem kolonial yang diskriminatif.

Dalam kehidupan masyarakat Tionghoa di Surabaya, keluarga Han, The, dan Tjoa memiliki peran penting sebagai kelompok elite Tionghoa yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi maupun pemerintahan kolonial melalui jabatan opsir Tionghoa seperti *Majoor*, *Kapitein*, dan *Luitenant der Chinezen*.⁷ Selain berperan sebagai pemimpin komunitas, ketiga keluarga tersebut membangun jaringan sosial yang luas melalui hubungan kekerabatan, perkawinan antarkeluarga elite, kegiatan sosial, serta berbagai perkumpulan internal. Keberadaan keluarga besar dan ikatan marga menjadi fondasi penting dalam memperkuat solidaritas internal masyarakat Tionghoa pada masa *wijkenstelsel*. Pemilihan keluarga Han, The, dan Tjoa sebagai fokus penelitian didasarkan pada kedudukan mereka sebagai elite Tionghoa yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Tionghoa Surabaya, keterhubungan mereka melalui jaringan perkawinan dan kekerabatan, serta ketersediaan sumber sejarah yang relatif lengkap, seperti silsilah keluarga, arsip kolonial, surat kabar, dan dokumentasi keluarga. Dengan karakteristik tersebut, ketiga keluarga dipilih sebagai studi kasus karena dinilai representatif untuk menjelaskan pola interaksi sosial dan pembentukan solidaritas internal dalam komunitas elite Tionghoa di Surabaya pada masa *wijkenstelsel*.

Penelitian mengenai masyarakat Tionghoa di Surabaya selama ini lebih banyak membahas aspek ekonomi, politik, dan perkembangan kawasan pecinan, sedangkan kajian mengenai interaksi sosial masyarakat Tionghoa pada masa pemberlakuan *wijkenstelsel* masih relatif terbatas. Padahal, kebijakan segregatif pemerintah kolonial secara langsung memengaruhi pola hubungan sosial masyarakat Tionghoa dan mendorong terbentuknya ruang interaksi internal yang kuat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana

¹ Howard Dick, *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History, 1900–2000* (Athens: Ohio University Press, 2002), hlm. 235.

² Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 17.

³ Handinoto, *Komunitas Cina dan Perkembangan Kota Surabaya* (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 22.

⁴ Purnawan Basundoro dan D. Y. Sofansyah, *Tempat-Tempat Bersejarah di Kota Surabaya* (Surabaya: Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kota Surabaya, 2024), hlm. 71.

⁵ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 69.

⁶ Handinoto, *op. cit.*, hlm. 45.

⁷ Steve Haryono, *Perkawinan Strategis: Hubungan Keluarga antara Opsir-Opsir Tionghoa dan Cabang Atas di Jawa pada Abad ke-19 dan 20* (Rotterdam: Steve Haryono, 2017), hlm. 45.

kebijakan *wijkenstelsel* memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat Tionghoa di Surabaya serta bagaimana keluarga Han, The, dan Tjoa membangun dan mempertahankan solidaritas sosial melalui hubungan kekerabatan, marga, dan perkawinan pada tahun 1843–1918.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terkait interaksi sosial masyarakat Tionghoa di Surabaya pada masa *wijkenstelsel* tahun 1843–1918 digunakan metode penelitian sejarah dari Kuntowijoyo yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.⁸ Penelitian ini memandang kebijakan *wijkenstelsel* sebagai kebijakan pemisahan pemukiman berdasarkan etnis yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kelompok non-Eropa, khususnya masyarakat Tionghoa di Surabaya.

Pada tahap pengumpulan sumber dilakukan penelusuran dan penghimpunan sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kebijakan *wijkenstelsel* dan masyarakat Tionghoa di Surabaya. Penelusuran dilakukan melalui arsip surat kabar dan majalah berbahasa Belanda yang diperoleh dari Delpher.nl seperti *Het Koloniaal Weekblad*, *Het Vaderland*, *De Locomotief*, *Soerabaiasch Handelsblad*, dan *Bataviaasch Handelsblad*. Selain itu, digunakan dokumen *Staatsblad van Nederlandsch-Indië wijkenstelsel*, surat Perpustakaan Medayu Agung dari Perpustakaan Medayu Agung, silsilah keluarga Han, serta buku peringatan Rumah Abu *The Goan Tjing*. Seluruh sumber tersebut dihimpun melalui penelusuran secara offline maupun online dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis sumber serta relevansinya terhadap penelitian.

Setelah sumber terkumpul, dilakukan proses verifikasi melalui kritik intern dan kritik ekstern untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber sejarah yang digunakan. Kritik ekstern dilakukan untuk memastikan keaslian sumber melalui penelusuran asal-usul, waktu penerbitan, dan kondisi sumber. Sementara itu, Kritik intern dilakukan untuk menilai isi atau substansi dari sumber sejarah melalui perbandingan antar sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, Silsilah keluarga Han, The, dan Tjoa tidak digunakan secara langsung sebagai sumber tunggal. Melainkan diverifikasi melalui perbandingan dengan surat kabar sezaman, arsip keluarga, catatan rumah Abu serta beberapa sumber buku dan literatur yang relevan untuk memastikan kesesuaian hubungan kekerabatan dan identitas tokoh yang diteliti seperti, karya Steve Haryono, mengenai keluarga-keluarga elite Tionghoa di Jawa. Selain itu, buku karya Kwee Hong-Sien digunakan sebagai sumber pembanding karena memuat informasi mengenai sejarah keluarga Han, Kwee, dan The di Pasuruan dan Surabaya. Adapun surat kabar kolonial juga dikaji secara kritis dengan

mempertimbangkan latar belakang penerbitan dan kemungkinan bias yang muncul akibat kedekatannya dengan kepentingan pemerintah kolonial maupun kelompok elite tertentu. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari surat kabar selalu dibandingkan dengan sumber lain untuk memperoleh data yang lebih objektif. Selain itu, Sumber visual berupa foto keluarga, rumah abu, dan dokumentasi perkumpulan dianalisis tidak hanya sebagai ilustrasi, tetapi sebagai sumber pendukung untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan, aktivitas sosial, serta simbol identitas yang berkaitan dengan solidaritas internal masyarakat elite Tionghoa di Surabaya. Melalui proses kritik sumber tersebut, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dapat saling diverifikasi sehingga menghasilkan rekonstruksi sejarah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber yang telah diverifikasi untuk menemukan keterkaitan antar fakta sejarah mengenai dinamika interaksi sosial masyarakat Tionghoa di Surabaya pada masa *wijkenstelsel*. Tahap terakhir yaitu historiografi dilakukan dengan menyusun hasil penelitian secara sistematis sehingga menghasilkan penulisan sejarah yang sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Surabaya Kolonial dan Penerapan *Wijkenstelsel*

Surabaya sebagai kota kolonial terbentuk melalui proses penguasaan dan penataan wilayah yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda sejak abad ke-18. Perubahan penting terjadi ketika Surabaya secara resmi berada di bawah kendali *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1743 melalui perjanjian politik antara VOC dan Susuhunan Pakubuwono II.⁹ Perjanjian tersebut memberikan kedaulatan atas wilayah pesisir seperti Surabaya, Madura Barat, Rembang, Jepara, dan Ujung Timur kepada VOC sebagai imbalan atas bantuan VOC dalam memadamkan pemberontakan dan peperangan. Sejak saat itu, VOC tidak hanya menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga memegang kendali politik dan administratif atas Surabaya sehingga perkembangan kota semakin diarahkan sesuai kepentingan kolonial.¹⁰

Di bawah kekuasaan VOC, Surabaya berkembang sebagai pusat perdagangan dan pertahanan kolonial di Jawa Timur. Pemerintah kolonial membangun berbagai fasilitas pertahanan seperti benteng, tembok kota, dan pos penjagaan untuk melindungi kepentingan dagang dan militer Belanda. Pembangunan diawali dengan pendirian loji dan benteng di sebelah utara Kota Surabaya lama yang kemudian berkembang ke arah utara di sekitar kawasan Jembatan Merah sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan kolonial. Kawasan kota bawah (*Beneden stad*) yang meliputi Kembang Jepun, Ampel, dan Jalan Rajawali berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi karena letaknya yang strategis di tepi Sungai Kalimas.

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

⁹ G.H. von Faber, *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indië's Eerste Koopstad van de Oudste Tijden tot de Instelling der Gemeente* (Soerabaia: Gemeente Soerabaia, 1931), hlm. 16.

¹⁰ Samidi Baskoro, "Surabaya sebagai Kota Kolonial Modern pada Akhir Abad ke-19: Industri, Transportasi, Permukiman, dan Kemajemukan Masyarakat," *Mozaik Humaniora*, Vol 17, No. 1, (2017), hlm. 169.

Kedudukan Surabaya sebagai kota kolonial semakin menguat ketika pada tahun 1763 ditetapkan sebagai pusat pemerintahan kolonial di wilayah timur Jawa dengan kedudukan *Gezaghebber in den Oosthoek*. Penetapan tersebut mendorong pembangunan infrastruktur pemerintahan dan pertahanan yang semakin intensif serta menggeser pusat aktivitas kota dari struktur kekuasaan lokal menuju kompleks administrasi dan perdagangan kolonial.¹¹ Setelah VOC mengalami kebangkrutan pada tahun 1799, kendali pemerintahan diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, perubahan kembali terjadi ketika Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels tahun 1808. Pada masa ini Surabaya berkembang sebagai kota dagang dan benteng melalui pembangunan Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*), pabrik senjata (*artillerie constructie winkel*), dan Benteng Lodewijk.

Perkembangan Surabaya sebagai kota kolonial semakin pesat setelah pemberlakuan Sistem Tanam Paksa tahun 1830. Surabaya berkembang sebagai pusat pengumpulan, pengolahan, dan distribusi hasil perkebunan dari wilayah pedalaman Jawa Timur, khususnya industri gula yang mengalami perkembangan pesat sejak dekade 1830-an. Pertumbuhan industri gula mendorong penggunaan teknologi modern berbasis mesin uap serta melahirkan industri pendukung seperti galangan kapal, industri logam, dan bengkel permesinan.¹² Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan arus migrasi penduduk Eropa maupun Timur Asing yang terlibat dalam sektor perdagangan, industri, dan jasa sehingga membentuk karakter kosmopolitan Surabaya sebagai kota kolonial.

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi mendorong pemerintah kolonial melakukan penataan ulang struktur kota dengan memindahkan penduduk pribumi dan membagi kawasan permukiman berdasarkan kelompok etnis. Kawasan pusat kota diperuntukkan bagi orang Eropa, Tionghoa, dan Arab, sementara benteng pertahanan seperti Benteng Prins Hendrik dibangun di sekitar muara Sungai Kalimas pada pertengahan abad ke-19.¹³ Keberadaan pelabuhan menjadikan Surabaya sebagai simpul penting perdagangan kolonial yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan jalur pelayaran internasional. Perkembangan Surabaya semakin pesat setelah diterapkannya *Suikerwet* dan *Agrarische Wet* tahun 1870 yang membuka peluang bagi pengusaha swasta untuk menyewa tanah dan mengembangkan industri perkebunan. Selain itu, pembongkaran benteng kota pada tahun 1871 menunjukkan bahwa pertumbuhan Surabaya sebagai kota kolonial berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas kegiatan ekonomi kolonial.

1. Upaya pemerintah kolonial mengatur tata kota secara struktural

Pertumbuhan Kota Surabaya sebagai kota kolonial yang semakin pesat mendorong meningkatnya

arus migrasi ke wilayah perkotaan. Bertambahnya jumlah penduduk dengan latar belakang etnis dan sosial yang beragam menimbulkan persoalan kepadatan penduduk serta pengelolaan ruang kota. Dalam kondisi tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan pengaturan pemukiman berdasarkan ras dan suku bangsa melalui sistem wilayah yang dikenal sebagai *wijkenstelsel*. Kebijakan ini merupakan bagian dari politik kolonial yang bersifat diskriminatif dan dalam praktiknya menyerupai sistem apartheid. Melalui *Regering Reglement* tahun 1854, penduduk Hindia Belanda dibagi ke dalam tiga golongan utama, yaitu golongan Eropa (*Europeanen*), Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), dan bumiputra (*Inlanders*).¹⁴ Setiap golongan memiliki hak dan kedudukan yang berbeda dalam kehidupan sosial, hukum, dan administrasi kolonial. Dalam sistem tersebut, masyarakat Tionghoa dimasukkan ke dalam kelompok Timur Asing bersama masyarakat Arab dan Melayu. Penggolongan ini kemudian menjadi dasar bagi penerapan kebijakan pengaturan ruang dan pemukiman di Kota Surabaya.

Pada tahun 1843, kota lama Surabaya dibagi menjadi dua wilayah utama berdasarkan etnis. Pemukiman orang Eropa ditempatkan di sisi barat Jembatan Merah, sedangkan pemukiman masyarakat Timur Asing berada di sisi timur. Kawasan Timur Asing meliputi Kampung Cina (*Chineesche Kamp*), Kampung Arab (*Arabische Kamp*), dan Kampung Melayu (*Maleische Kamp*) di sekitar Jalan Panggung dan Nyamplungan. Sementara itu, penduduk pribumi tersebar di luar kawasan tersebut. Pembagian wilayah tersebut menunjukkan bahwa pengaturan ruang kota sejak awal dirancang untuk memisahkan kelompok penduduk berdasarkan latar belakang etnis. Penerapan *wijkenstelsel* tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan pemukiman, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial dan politik. Pemerintah kolonial mewajibkan setiap golongan penduduk tinggal di kawasan tertentu sehingga memudahkan pengawasan terhadap mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, dan hubungan antaretnis di dalam kota. Selain itu, pengelompokan penduduk berdasarkan ras dan suku bangsa mempermudah penerapan kebijakan hukum dan administrasi yang berbeda bagi setiap golongan sekaligus mempertegas kedudukan orang Eropa sebagai kelompok tertinggi dalam struktur sosial kolonial.

Tujuan awal penerapannya, kebijakan Kampung Cina diberlakukan untuk melindungi masyarakat Tionghoa dari sentimen anti-Cina sekaligus mencegah terjadinya pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Kebijakan tersebut muncul setelah terjadinya krisis industri gula tahun 1740 yang menyebabkan banyak pengusaha dan pekerja Tionghoa kehilangan mata pencaharian. Kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan deportasi dan kerja paksa yang memicu keresahan di kalangan masyarakat Tionghoa. Ketegangan ini memuncak dalam pembantaian massal orang-orang Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740 dan diikuti oleh Perang Cina atau Geger Pecinan tahun 1742 melalui perlawanan gabungan antara laskar

¹¹ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid II* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 217–222.

¹² Howard Dick, *op. cit.*, hlm. 253–258.

¹³ Handinoto, *Perkembangan Kota Dan Arsitektur Kolonial*

Belanda Di Surabaya 1870-1940 (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hlm. 34-35.

¹⁴ Andjarwati Noordjanah, *op. cit.*, hlm. 82.

Tionghoa dan pasukan Mataram terhadap VOC di Jawa. Peristiwa tersebut mendorong pemerintah kolonial menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap masyarakat Tionghoa melalui pengaturan ruang dan pemukiman.¹⁵

Memasuki abad ke-19, orientasi penerapan *wijkenstelsel* mengalami perubahan. Dalam *Staatsblad* tahun 1835 No. 37 disebutkan bahwa salah satu tujuan utama kebijakan tersebut adalah untuk menghindari tercampurnya (*almagatie*) berbagai bangsa di Jawa.¹⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *wijkenstelsel* tidak hanya diterapkan di Surabaya, tetapi juga di berbagai kota kolonial lain seperti Batavia dan Semarang yang memiliki komunitas Timur Asing dalam jumlah besar. Melalui kebijakan ini, pemerintah kolonial mengatur pemukiman masyarakat berdasarkan etnis agar lebih mudah diawasi dan dikendalikan. Selain itu, pemerintah kolonial juga khawatir terhadap kemungkinan terjalannya kerja sama antara masyarakat Tionghoa dan pribumi yang dapat mengancam stabilitas kekuasaan kolonial.

Ketentuan mengenai pemisahan pemukiman kemudian ditegaskan kembali melalui berbagai peraturan pemerintah Hindia Belanda tahun 1835, 1866, dan 1871. Dalam ketentuan tersebut, pejabat setempat diperintahkan untuk menentukan wilayah-wilayah yang digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat Tionghoa dan golongan Timur Asing lainnya agar lebih mudah diawasi. Penempatan tersebut bersifat wajib sehingga masyarakat Tionghoa yang ingin tinggal di luar kawasan yang telah ditentukan harus memperoleh izin dari pejabat kolonial setempat.¹⁷ Selain itu, masyarakat Tionghoa diwajibkan tinggal di kampung-kampung mereka sendiri dan berada di bawah pengawasan pemimpin komunitasnya.¹⁸ Dengan demikian, *wijkenstelsel* berkembang tidak hanya sebagai kebijakan pengaturan tata kota, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan sosial terhadap masyarakat non-Eropa dalam struktur kolonial Hindia Belanda.

Penerapan *wijkenstelsel* di Surabaya diperkuat melalui berbagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat Timur Asing, khususnya masyarakat Tionghoa. Penduduk Timur Asing yang tetap tinggal di luar wilayah yang telah ditentukan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda sebesar f.25 hingga f.100 serta diberikan batas waktu untuk kembali ke kawasan yang telah ditetapkan pemerintah kolonial.¹⁹ Apabila melebihi batas waktu tersebut, mereka dipaksa masuk kembali ke wilayah pemukiman yang telah ditentukan.²⁰ Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengaturan pemukiman tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dijalankan melalui mekanisme pengawasan yang ketat.

Pengawasan terhadap masyarakat Tionghoa juga dilakukan melalui struktur kepemimpinan komunitas. Sejak awal abad ke-19 hingga akhir masa kolonial, masyarakat Tionghoa dipimpin oleh pejabat yang dikenal sebagai opir Tionghoa dengan tingkatan jabatan seperti *Majoor*, *Kapitein*, *Luitenant*, dan *Wijkmeester*. Di kota-kota besar seperti Batavia, para opir Tionghoa tersebut membentuk Dewan Tionghoa atau *Kong Koan* yang berfungsi membantu pemerintah kolonial dalam mengawasi dan mengatur masyarakat Tionghoa.²¹ Melalui sistem ini, pemerintah kolonial dapat mengontrol masyarakat Tionghoa secara tidak langsung melalui elite komunitasnya sendiri.

Selain *wijkenstelsel*, pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan *passenstelsel* sejak tahun 1816. Melalui kebijakan ini, masyarakat Tionghoa diwajibkan memiliki surat jalan apabila hendak bepergian dari satu Kampung Cina ke kampung lainnya atau ke wilayah pemukiman etnis lain. Prosedur pengurusan surat jalan yang rumit dan memakan waktu menjadikan kebijakan ini sangat membatasi mobilitas masyarakat Tionghoa, terutama dalam aktivitas perdagangan.²² Meskipun secara resmi bertujuan mengawasi pergerakan penduduk, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk membatasi hubungan dan komunikasi antara masyarakat Tionghoa dengan penduduk pribumi.

Pengawasan pemerintah kolonial terhadap masyarakat Tionghoa bahkan mencakup pengaturan identitas fisik. Sebagai bagian dari golongan Timur Asing, masyarakat Tionghoa diwajibkan menggunakan kuncir panjang (*thauwcang*) dan mengenakan pakaian khas Tionghoa di ruang publik.²³ Penggunaan pakaian di luar ketentuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan kolonial.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan kolonial tidak hanya mengatur ruang pemukiman dan mobilitas masyarakat Tionghoa, tetapi juga membentuk batas identitas sosial yang membedakan mereka dari kelompok penduduk lainnya dalam struktur masyarakat kolonial.

2. Dinamika dan Respon Masyarakat terhadap Kebijakan

Penerapan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat Tionghoa di Surabaya. Kebijakan pemisahan pemukiman menyebabkan masyarakat Tionghoa hidup dalam ruang sosial yang terpisah dari kelompok penduduk lainnya serta berada dalam pengawasan pemerintah kolonial. Kondisi tersebut membatasi hubungan sosial antarkelompok dan menjadikan interaksi masyarakat berlangsung dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial.¹ Dalam praktiknya, kebijakan ini dipahami sebagai bentuk perlindungan sepihak yang lebih menguntungkan golongan Eropa, sementara masyarakat

¹⁵ Mona Lohanda, *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2007), hlm. 243.

¹⁶ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, No 37 Tahun 1835, hlm. 51-52.

¹⁷ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, No 145 Tahun 1871, hlm. 1.

¹⁸ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, No 146 Tahun 1871, hlm. 1-10.

¹⁹ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, No 56 Tahun 1866,

hlm. 2.

²⁰ *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, No 57 Tahun 1866, hlm. 1-2.

²¹ Ong Hok Ham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 171.

²² "Oost-Indie: Het passenstelsel." *Het Vaderland*, 29 September 1910, hlm. 7.

²³ Andjarwati Noordjanah, *op. cit.*, hlm. 82.

pribumi ditempatkan sebagai kelompok yang dianggap perlu dijauhkan dari masyarakat Tionghoa.²⁴ Akibatnya, berkembang pandangan di kalangan masyarakat Tionghoa bahwa hubungan sosial antarkelompok sulit tumbuh secara seimbang karena sejak awal mereka ditempatkan dalam posisi yang tidak sejajar dalam struktur sosial kolonial.²⁵

Pemisahan ruang melalui *wijkenstelsel* juga membentuk batas-batas sosial yang jelas di dalam kehidupan masyarakat kota. Setiap golongan hidup dalam lingkungan sosialnya masing-masing dengan aturan, struktur kepemimpinan, dan tata kehidupan yang berbeda. Masyarakat Eropa memperoleh akses yang lebih luas terhadap fasilitas kota, pendidikan, dan layanan publik, sedangkan masyarakat Timur Asing dan pribumi menghadapi berbagai pembatasan dalam ruang gerak dan aktivitas sosial. Sikap pemerintah kolonial yang tetap mempertahankan kebijakan pemisahan pemukiman menunjukkan bahwa *wijkenstelsel* dipandang sebagai bagian penting dari strategi pengendalian sosial dan pemeliharaan hierarki kolonial di ruang perkotaan. Selain memengaruhi pola interaksi sosial, *wijkenstelsel* juga berpengaruh terhadap pembentukan identitas sosial masyarakat kota. Pengelompokan penduduk berdasarkan ras dan suku bangsa menjadikan identitas etnis sebagai penanda utama dalam kehidupan sosial perkotaan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut melahirkan stratifikasi sosial dan membentuk relasi antarkelompok yang bersifat hierarkis dengan golongan Eropa berada pada posisi dominan. Dengan demikian, *wijkenstelsel* tidak hanya mengatur tempat tinggal penduduk, tetapi juga memengaruhi pola interaksi sosial, pembentukan identitas, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat kolonial Surabaya.

Bagi masyarakat Tionghoa, kondisi tersebut mendorong terbentuknya solidaritas internal yang kuat di kawasan Kampung Cina. Pemusatan pemukiman memungkinkan berkembangnya hubungan kekerabatan, kegiatan ekonomi, serta organisasi sosial dan keagamaan di antara sesama masyarakat Tionghoa. Dalam situasi keterbatasan ruang dan pengawasan kolonial, muncul dorongan untuk membangun persatuan sebagai bentuk adaptasi dan perlindungan sosial terhadap pembatasan kolonial. Ikatan keluarga dan marga kemudian menjadi landasan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa di Surabaya. Namun, kondisi tersebut juga menyebabkan masyarakat Tionghoa semakin terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya sehingga proses asimilasi sosial menjadi terbatas.²⁶

Pemisahan ruang kota dan pembatasan mobilitas melalui *passenstelsel* semakin mempersempit hubungan sosial masyarakat Tionghoa dengan kelompok penduduk

lain. Interaksi dengan masyarakat pribumi maupun Eropa umumnya berlangsung dalam konteks perdagangan atau urusan administratif sehingga komunikasi sosial yang lebih luas sulit terjalin. Pembatasan tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat Tionghoa karena dianggap semakin membatasi ruang kehidupan sosial mereka.

Memasuki awal abad ke-20, seiring berkembangnya perubahan sosial dan munculnya kesadaran mengenai persamaan hak, pembatasan yang diterapkan melalui *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* mulai dipertanyakan oleh masyarakat Tionghoa. Pada tahun 1914 muncul wacana penghapusan kedua kebijakan tersebut yang dimuat dalam surat kabar mengenai konferensi para residen di Surabaya.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari tata kelola kolonial mulai dipandang sebagai bentuk ketimpangan sosial yang menghambat kemajuan masyarakat Tionghoa.

Masalah tersebut tidak lagi dipahami sekadar sebagai aturan administratif, melainkan sebagai bentuk diskriminasi yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai pemberitaan pada masa itu menunjukkan adanya tuntutan kepada pemerintah kolonial agar segera menghapus *passenstelsel* dan *wijkenstelsel*.²⁸ Pembatasan yang sebelumnya dijalankan sebagai sarana pengawasan mulai dianggap sebagai hambatan terhadap mobilitas sosial dan perkembangan ekonomi masyarakat Tionghoa. Dinamika tersebut akhirnya berujung pada penghapusan *wijkenstelsel* pada tahun 1918 yang menandai berakhirnya sistem pemisahan wilayah berdasarkan etnis dalam tata kota kolonial Surabaya.

B. Pola Interaksi Sosial Masyarakat Tionghoa di Surabaya

Penerapan kebijakan *wijkenstelsel* oleh pemerintah kolonial Belanda membawa pengaruh terhadap terbentuknya ruang sosial masyarakat Tionghoa di Kota Surabaya. Pemisahan pemukiman berdasarkan ras dan golongan menyebabkan masyarakat Tionghoa ditempatkan dalam kawasan tersendiri yang terpisah dari pemukiman orang Eropa maupun pribumi. Kondisi tersebut membentuk lingkungan sosial yang relatif tertutup sehingga interaksi antarsesama anggota komunitas berlangsung secara intens dan membentuk pola hubungan sosial yang kuat di dalam komunitas Tionghoa. Sebaliknya, interaksi dengan kelompok penduduk lain cenderung terbatas dan umumnya berlangsung dalam konteks perdagangan.

Kawasan Kampung Cina kemudian berkembang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang sosial bagi berlangsungnya aktivitas sosial,

²⁴ Menyebutkan bahwa Tjipto Mangoen Koesoemo dalam sebuah artikel utama mengkritik keras sistem *wijkenstelsel* (sistem pemukiman terpisah) untuk orang tionghoa, mempertanyakan motif di baliknya karena baik Tionghoa maupun pribumi adalah orang Asia. Gesekan antara pribumi dan Tionghoa bukan motif ekonomi, melainkan karena politik pemerintah kolonial yang menerapkan strategi "pecah belah" dan "kuasa" (*verdeel en heers*) untuk mencegah persaudaraan antara keduanya lihat "Chineesche Pers." *Koloniaal Tijdschrift* Jrg 6, 1 Januari 1917, hlm. 968-969.

²⁵ "Wat De Chinees Vertelt." *Het Koloniaal Weekblad Orgaan Der Vereeniging Oost En West*, 7 Februari 1918, hlm. 6.

²⁶ Ong Hok Ham, *Rakyat dan Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 29.

²⁷ "De Residenten-conferentie" *Het Koloniaal Weekblad Orgaan Der Vereeniging Oost En West*, 26 Februari 1914, hlm. 2.

²⁸ "Ups and Down in De Indo-Chineesche Wereld" *Indie Jrg* 1, 13 Juni 1917, hlm. 168.

ekonomi, dan budaya masyarakat Tionghoa. Dalam kondisi pembatasan ruang dan mobilitas, masyarakat Tionghoa cenderung membangun kehidupan sosial yang lebih tertutup sebagai bentuk adaptasi terhadap struktur kota kolonial.²⁹ Kondisi tersebut turut mendorong berkembangnya norma, kebiasaan, dan solidaritas internal yang tumbuh melalui hubungan sosial antarsesama anggota komunitas.

Pemisahan ruang pemukiman juga memperkuat identitas ke-Tionghoan melalui pelestarian budaya tradisional Tiongkok di lingkungan keluarga maupun komunitas.²⁹ Ruang sosial di kawasan pecinan kemudian menjadi landasan bagi berkembangnya hubungan sosial internal yang lebih erat serta memperkuat peran keluarga besar, ikatan marga, dan kepemimpinan komunitas dalam kehidupan masyarakat Tionghoa di Surabaya.

1. Peran Keluarga Besar dalam Kehidupan Sosial

Dalam kehidupan masyarakat Tionghoa, keluarga besar memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai hubungan keturunan, tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi. Melalui keluarga besar, anggota keluarga memperoleh dukungan sosial, ekonomi, dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hubungan antarkeluarga di dalam komunitas Tionghoa terjalin cukup erat dan berlangsung secara berkelanjutan antargenerasi. Pada umumnya, masyarakat Tionghoa menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang mengikuti garis ayah atau laki-laki. Dalam sistem ini, anak laki-laki dipandang sebagai penerus keluarga sekaligus pewaris marga keluarga. Karena itu, nama marga diwariskan kepada anak laki-laki dan diletakkan di bagian depan nama pribadi sebagai penanda identitas keluarga dan hubungan dengan leluhur. Sistem kekerabatan tersebut juga bersifat patriarkal karena laki-laki memiliki kedudukan utama di dalam keluarga, sedangkan perempuan setelah menikah dianggap mengikuti keluarga pihak suami.³⁰

Dalam masyarakat Tionghoa juga dikenal pembagian antara warga dalam dan warga luar berdasarkan garis keturunan keluarga. Garis keturunan atau *she* keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan hak pewarisan dan kedudukan seseorang dalam keluarga besar. Sistem seperti ini masih banyak dipertahankan terutama oleh kelompok Tionghoa totok yang cenderung menjaga tradisi budaya Tiongkok. Namun, setelah berkembangnya interaksi dengan masyarakat pribumi, sebagian masyarakat Tionghoa mulai mengalami perubahan dalam pola kekerabatan. Pengaruh budaya lokal menyebabkan munculnya sistem kekerabatan bilineal yang mengakui hubungan keluarga dari pihak ayah maupun ibu. Kondisi tersebut lebih banyak terlihat pada kelompok Tionghoa peranakan yang telah mengalami proses pembauran dengan budaya lokal. Meskipun demikian, prinsip

patrilineal tetap menjadi dasar utama dalam kehidupan keluarga masyarakat Tionghoa.

Kuatnya ikatan kekeluargaan masyarakat Tionghoa juga dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme yang menekankan loyalitas keluarga, penghormatan kepada leluhur, dan pentingnya kerja sama antarsesama anggota keluarga. Dalam ajaran Konfusianisme dikenal konsep *familiarisme*, yaitu pandangan yang menempatkan keluarga sebagai pusat kehidupan sosial.³¹ Konsep tersebut membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat Tionghoa yang cenderung mendahulukan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan pribadi. Nilai-nilai tersebut kemudian diperkuat oleh pengaruh Taoisme yang mendorong terciptanya hubungan kerja sama dan solidaritas di antara anggota keluarga.

Pengaruh ajaran tersebut tercermin dalam kuatnya solidaritas dan kepedulian sosial antarkerabat di kalangan masyarakat Tionghoa. Hubungan kekeluargaan menjadi ruang utama berlangsungnya proses sosialisasi nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Hubungan kekeluargaan diwujudkan melalui praktik saling membantu antarkerabat, baik dalam persoalan ekonomi maupun kegiatan sosial komunitas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keluarga besar berfungsi sebagai dasar utama solidaritas sosial masyarakat Tionghoa sekaligus sebagai bentuk perlindungan sosial di lingkungan perkotaan kolonial.

Selain memiliki fungsi sosial, keluarga besar juga berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Tionghoa. Aktivitas perdagangan dan usaha umumnya dijalankan berdasarkan hubungan kekerabatan yang dilandasi rasa saling percaya antarkerabat. Keluarga menjadi jaringan utama dalam memperoleh modal, tenaga kerja, dan dukungan ekonomi sehingga hubungan sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa berkembang melalui ikatan kekeluargaan yang kuat.⁴ Rasa persaudaraan tersebut tumbuh dari kesamaan asal-usul, pengalaman hidup di perantauan, serta kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi komunitas. Dalam perkembangannya, struktur keluarga besar tersebut kemudian menjadi dasar terbentuknya marga sebagai jaringan sosial internal masyarakat Tionghoa di Surabaya.

2. Perkawinan sebagai Strategi Sosial Masyarakat Tionghoa

perkawinan dalam masyarakat Tionghoa tidak hanya dipahami sebagai hubungan keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari strategi sosial untuk mempertahankan identitas dan solidaritas komunitas. Pada masa tersebut, banyak laki-laki Tionghoa totok di Surabaya yang telah menikah dengan perempuan pribumi, tetapi karena tekanan keluarga dan kuatnya tradisi leluhur, mereka kemudian kembali menikah dengan perempuan Tionghoa totok.³² Dalam lingkungan keluarga Tionghoa totok, perkawinan dengan perempuan pribumi sering dipandang tidak sesuai

²⁹ Shinta Devi, *Etnis Tionghoa dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat Kota Surabaya* (Surabaya: Revka Petra Media, 2014), hlm. 29.

³⁰ Leo Suryadinata, *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995* (Singapore: Singapore University Press, 1997), hlm.

68-69.

³¹ P. Hariyanto, *Kultur Cina di Jawa, Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 83.

³² Shinta Devi, *op. cit.*, hlm. 28.

dengan tradisi keluarga sehingga kurang diterima dalam kehidupan sosial komunitas Tionghoa.

Penerapan *wijkenstelsel* turut memperkuat kecenderungan tersebut. Pemisahan pemukiman berdasarkan etnis menyebabkan masyarakat Tionghoa yang sebelumnya lebih membaaur dengan kelompok lain mulai hidup dalam lingkungan komunitas yang lebih tertutup. Kondisi tersebut mengurangi intensitas pergaulan dengan kelompok masyarakat di luar komunitas Tionghoa dan secara tidak langsung mendorong meningkatnya perkawinan antarkeluarga Tionghoa. Dalam perkembangan selanjutnya, perkawinan menjadi sarana penting untuk memperkuat hubungan kekerabatan, menjaga solidaritas internal, serta mempertahankan identitas sosial masyarakat Tionghoa di Surabaya. Akibatnya, perkawinan dengan kelompok di luar komunitas Tionghoa mulai dipandang kurang lazim dibandingkan sebelumnya.³³ Melalui perkawinan antarkeluarga, hubungan sosial antarkerabat menjadi semakin erat sekaligus memperluas jaringan sosial dan ekonomi di dalam komunitas Tionghoa.

Hubungan kekerabatan masyarakat Tionghoa tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperkuat melalui perkawinan antarkeluarga besar. Perkawinan menjadi strategi sosial untuk menjaga solidaritas internal, memperkuat hubungan antarmarga, serta mempertahankan status sosial dan pengaruh ekonomi di dalam komunitas Tionghoa. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari kepentingan sosial keluarga besar.³⁴ Melalui perkawinan, hubungan antarkeluarga menjadi semakin erat dan membangun rasa saling percaya yang penting dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat Tionghoa.³⁵ Dalam praktiknya, perkawinan antarkeluarga elite biasanya dibantu oleh mak comblang atau '*tjoh*' '*mlang*' yang bertugas mempertemukan calon pasangan dan mengatur proses pernikahan sesuai tradisi Tionghoa.³⁶

Hubungan perkawinan antara keluarga Han, The, dan Tjoa menunjukkan bagaimana perkawinan digunakan sebagai sarana memperkuat jaringan elite Tionghoa di Surabaya. Dari silsilah keluarga The diketahui bahwa The Boen Hie dan The Boen Khe menikah dengan perempuan bermarga Han yang diperkirakan berasal dari keturunan Han Bwee Kong. Pola tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan perkawinan endogami di kalangan elite Tionghoa untuk mempertahankan status sosial dan memperkuat hubungan antarkeluarga besar. Pola perkawinan tersebut berlanjut pada generasi berikutnya. The Ling Nio menikah dengan Letnan Han Tjong Ling, sementara Mayor Han Tjong Khing menikah dengan The Gwat Bie Nio, putri Mayor The Boen Khe. Selain itu, Han Tjong Tie juga menikah dengan The Siang Nio yang masih berasal dari lingkaran keluarga yang sama. Rangkaian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara

keluarga Han dan The dibangun secara berkelanjutan sebagai jaringan kekerabatan elite dalam masyarakat Tionghoa Surabaya.

Papan Puja Kayu (Sinci) Anggota keluarga The dan Han



dalam Rumah Abu Han di Surabaya

Sumber : Dokumen pribadi Penulis

Kedekatan hubungan kekerabatan tersebut juga tercermin dalam keberadaan sinci keluarga Han dan The yang menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap leluhur dalam tradisi Tionghoa. Selain memiliki fungsi religius, sinci menjadi simbol keterikatan genealogis yang memperkuat identitas keluarga dan solidaritas sosial antarkeluarga elite Tionghoa. Keberadaan sinci tersebut memperlihatkan bagaimana ikatan kekerabatan tidak hanya dipertahankan melalui hubungan perkawinan, tetapi juga melalui tradisi penghormatan leluhur yang berfungsi menjaga kesinambungan identitas dan memori kolektif keluarga dari generasi ke generasi. Selain itu, kedudukan sosial keluarga Tjoa juga diperkuat melalui hubungan perkawinan dengan keluarga-keluarga Tionghoa terkemuka lainnya, salah satunya keluarga Han yang merupakan keturunan Han Bwee Kong. Hubungan tersebut menunjukkan adanya jaringan sosial antarkeluarga elite Tionghoa di Surabaya memperkuat posisi sosial mereka dalam komunitas Tionghoa. Letnan Tjoa Sien Hie diketahui memiliki dua istri yang berasal dari keluarga Han keturunan Han Bwee Kong. Selain itu, hubungan antara keluarga Tjoa dan The terlihat melalui perkawinan Tjoa Tjwan Ie dengan The Poo Kiat, putri Kapiten The Toan Lok. Melalui hubungan perkawinan tersebut, keluarga Han, The, dan Tjoa tidak hanya terhubung secara genealogis, tetapi juga membangun jaringan sosial dan politik di dalam komunitas Tionghoa. Ikatan perkawinan memperkuat hubungan kepercayaan, solidaritas, serta dukungan antarkeluarga dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengisian jabatan opsir Tionghoa dan pengelolaan kepentingan ekonomi. Dengan demikian, perkawinan menjadi salah satu sarana penting dalam menjaga stabilitas kepemimpinan elite Tionghoa di Surabaya.

³³ Akibat dari peraturan tersebut orang tionghoa menjadi terkelompokkan dan tidak lagi bebas bergaul serta berkomunikasi dengan kelompok lainnya, seperti sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut.

³⁴ Steve Haryono, *op. cit.*, hlm. 8.

³⁵ Mereka biasanya disebut dengan "Sia" (Keturunan dari opsir Tionghoa di Jawa sebagai tanda status bangsawan) tentu mencari

pasangan untuk putra-putri mereka dari kalangan yang sama jika tidak berhasil baru berpaling pada keluarga yang secara finansial mampu dan setara dengan mereka. *Ibid.*

³⁶ Kwee Hong-Sien, *History of the Han, Kwee, and The Families from Pasuruan and Surabaya* (Kwee Publication, 2023), hlm. 15.



Keluarga The Tik Gwan dan Oei Thiem Nio

Sumber: Kwee Hong-Sien, *History of the Han, Kwee, and The Families from Pasuruan and Surabaya*, 2023

Pola perkawinan tersebut juga memperlihatkan hubungan keluarga Han, The, dan Tjoa dengan keluarga elite Tionghoa lainnya, seperti keluarga Kwee, Bé, Oei, dan Liem. Salah satunya terlihat dari perkawinan The Tik Gwan, anak The Siok Lian, dengan Oei Thiem Nio yang merupakan saudara perempuan Oei Tiong Ham. Selain itu, The Tien Nio menikah dengan Kwee Tjoen Liat, cucu Mayor Kwee Sik Poo dari Pasuruan. Hubungan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa jaringan kekerabatan keluarga The tidak hanya terbatas pada lingkungan elite Tionghoa Surabaya, tetapi juga terhubung dengan keluarga-keluarga Tionghoa berpengaruh di berbagai daerah di Jawa. Keterhubungan tersebut tercermin dalam foto keluarga The Tik Gwan dan Oei Thiem Nio yang memperlihatkan salah satu bentuk ikatan perkawinan antarkeluarga elite Tionghoa. Melalui perkawinan tersebut, hubungan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai ikatan genealogis, tetapi juga menjadi sarana untuk memperluas jaringan sosial dan mempertahankan posisi keluarga-keluarga elite Tionghoa dalam masyarakat kolonial.



Keluarga Letnan Tjoa Sien Hie

Sumber: Matahari, Semarang 1 Agustus 1934

Sementara itu, dari garis keturunan Tjoa Sien Hie, beberapa anggota keluarga Tjoa juga menjalin hubungan perkawinan dengan keluarga opsir Tionghoa lainnya. Tjoa Pie Nio menikah dengan Letnan Bé Kwat King, sedangkan Tjoa Tjwan Hong menikah dengan Kwee Tjie Kiem, putri Mayor Kwee Sik Poo dari Pasuruan. Selain itu, Tjoa Tian Nio menikah dengan Liem Hong Djien, putra Letnan Liem King Tie dari Blora, dan Tjoa Tjiauw Nio menikah dengan Tjan Tjoen Lian, cucu Kapiten Khouw Tiong Houw dari Batang.³⁷ Pola perkawinan tersebut menunjukkan bahwa jaringan kekerabatan elite Tionghoa tidak hanya

berkembang dalam lingkup lokal Surabaya, tetapi juga terhubung dengan keluarga-keluarga opsir Tionghoa di berbagai kota di Jawa sebagai bagian dari upaya memperluas jaringan sosial dan mempertahankan kedudukan elite dalam masyarakat kolonial. Jaringan kekerabatan tersebut tercermin dalam foto keluarga Letnan Tjoa Sien Hie yang menunjukkan keterhubungan keluarga Tjoa dengan berbagai keluarga elite Tionghoa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan menjadi salah satu sarana penting dalam memperluas jaringan sosial dan mempertahankan solidaritas di kalangan elite Tionghoa.

Perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa yang berlandaskan prinsip patrilineal. Meskipun garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki, perkawinan antarmarga membuka ruang terbentuknya hubungan sosial yang lebih luas antarkeluarga besar. Perempuan yang masuk ke dalam keluarga suami tidak hanya menjadi bagian dari struktur keluarga baru, tetapi juga berperan sebagai penghubung yang mempererat jaringan sosial dan solidaritas antarkelompok kekerabatan. Peran perempuan dalam jaringan keluarga elite Tionghoa tidak terbatas pada lingkup domestik, tetapi juga terlihat dalam aktivitas ekonomi dan sosial keluarga. Dalam silsilah keluarga Han, misalnya, perempuan turut terlibat dalam pengelolaan dan keberlangsungan usaha keluarga. *N.V. Bouw Maatschappij* yang berdiri pada tahun 1899 tercatat dimiliki oleh Tan Tiam Wan bersama dua anaknya, Han Kwat Tjee dan Han Kwat Tjay, yang merupakan putra Letnan Han Tjoei Wan. Setelah suaminya meninggal, usaha keluarga tetap dijalankan oleh anak-anak dan anggota keluarga lainnya, termasuk dalam industri gula. Selain itu, The Giok Nio, putri tunggal The Boen Tiong, diketahui mewarisi kekayaan keluarganya dan memiliki tanah di kawasan Embong Malang serta Petemon yang pengelolaannya melibatkan kerabat keluarga The. Meskipun menikah dengan Letnan Tan Thwan Hing, pada tahun 1911 ia menyumbangkan uang sebanyak f. 2500 untuk modal dari rumah abu keluarga The, dengan imbalan anaknya, Tan Siok Poo menjadi anggota komite manajemen.³⁸ Keterlibatan perempuan dalam kepentingan ekonomi keluarga menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan jaringan sosial dan ekonomi keluarga besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam keluarga elite Tionghoa tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari struktur kekerabatan, tetapi juga turut menjaga nama baik keluarga serta memperkuat posisi sosial keluarga dalam masyarakat kolonial. Perkawinan dalam masyarakat elite Tionghoa tidak hanya berfungsi sebagai hubungan personal antarkeluarga, tetapi juga sebagai strategi sosial yang memperkuat jaringan kekerabatan, memperluas hubungan antarelite, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi komunitas Tionghoa di Surabaya pada masa kolonial.

³⁷ Steve Haryono, *op. cit.*, hlm. 116.

³⁸ Handinoto, *op. cit.*, hlm. 84.

3. Struktur Kepemimpinan dan Jaringan Elite Tionghoa di Surabaya

Sistem opsir Tionghoa merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan tidak langsung yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui *Binnelandsch Bestuur*.³⁹ Dalam sistem tersebut, elite Tionghoa ditempatkan sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan komunitas Tionghoa yang diklasifikasikan sebagai *Vreemde Oosterlingen* atau Timur Asing. Melalui kebijakan pemukiman pecinan, pemerintah kolonial tidak hanya mempermudah pengawasan sosial dan ekonomi terhadap etnis Tionghoa, tetapi juga membentuk struktur kepemimpinan lokal yang loyal terhadap kepentingan kolonial.⁴⁰

Struktur kepemimpinan opsir Tionghoa terdiri atas tiga jenjang utama, yaitu *Luitenant der Chinezen*, *Kapitein der Chinezen*, dan *Majoor der Chinezen*.⁴¹ Sebagai kota besar dengan populasi Tionghoa yang signifikan, Surabaya memiliki struktur kepemimpinan lengkap yang dipimpin oleh seorang Mayor Tionghoa serta didukung oleh beberapa Kapiten dan Letnan. Hierarki tersebut menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa di Surabaya memiliki posisi strategis dalam tata administrasi kolonial, khususnya dalam bidang perdagangan dan pengelolaan komunitas. Masing-masing jabatan memiliki fungsi administratif dan sosial yang berbeda. Letnan Tionghoa berhubungan langsung dengan masyarakat melalui pengawasan terhadap *wijkmeester* dan administrasi komunitas. Kapiten lebih banyak menjalankan fungsi representatif dalam hubungan dengan pejabat kolonial, sedangkan Mayor Tionghoa menduduki posisi tertinggi sebagai pemimpin komunitas sekaligus ketua Dewan Tionghoa. Kedudukan Mayor tidak hanya mencerminkan otoritas administratif, tetapi juga memperlihatkan kedekatan elite Tionghoa tertentu dengan kepentingan ekonomi pemerintah kolonial.

Selain jabatan aktif, pemerintah kolonial juga memberikan gelar opsir tituler sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa dan loyalitas elite Tionghoa. Gelar tersebut memiliki nilai prestise yang tinggi dan menjadi simbol status sosial dalam komunitas. Dalam perkembangannya, sistem opsir tidak hanya melahirkan struktur kepemimpinan formal, tetapi juga membentuk jaringan elite Tionghoa yang memiliki pengaruh ekonomi, sosial, dan politik di Surabaya. Untuk memperkuat fungsi administrasi komunitas, dibentuk lembaga *Kong Koan* atau Dewan Opsir Tionghoa yang beranggotakan para opsir aktif. Lembaga ini berperan dalam pencatatan perkawinan, pengelolaan tanah pekuburan, serta pengawasan kelenteng dan rumah ibadat.⁴² Keberadaan *Kong Koan* menunjukkan

bahwa elite Tionghoa di Surabaya memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial komunitas sekaligus mendukung stabilitas pemerintahan kolonial.

Pengangkatan opsir Tionghoa pada masa kolonial tidak hanya didasarkan pada kebutuhan administratif, tetapi juga mempertimbangkan status ekonomi, pengaruh sosial, serta reputasi keluarga calon pejabat. Jabatan opsir tidak memperoleh gaji tetap dari pemerintah kolonial sehingga individu yang diangkat umumnya berasal dari kalangan elite ekonomi yang mampu menjalankan tugas administratif dan sosial secara mandiri. Sebagai kompensasi, para opsir memperoleh berbagai privilese, seperti kemudahan usaha, pemberian tanah, peningkatan status sosial, serta kedekatan dengan penguasa kolonial. Selain memiliki kemampuan ekonomi, calon opsir juga diharuskan memahami adat dan budaya Tionghoa serta memiliki reputasi yang baik di lingkungan komunitasnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jabatan opsir tidak hanya berkaitan dengan fungsi administratif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kepemilikan modal sosial dan ekonomi.

Dalam praktiknya, proses pengangkatan opsir sering kali mempertimbangkan hubungan kekerabatan dengan opsir sebelumnya. Meskipun secara formal jabatan opsir bukan jabatan turun-temurun, pemerintah kolonial cenderung memberikan kepercayaan kepada keluarga yang telah dikenal loyal dan memiliki kontribusi terhadap kepentingan kolonial.⁴³ Dengan demikian, sistem opsir secara tidak langsung membentuk pola kepemimpinan berbasis keluarga elite dalam komunitas Tionghoa. Di Surabaya, pola tersebut terlihat melalui dominasi keluarga Han dan keluarga The dalam jabatan Letnan maupun Kapiten Tionghoa. Dominasi kedua keluarga tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan Tionghoa dibangun melalui jaringan kekerabatan, kekuatan ekonomi, dan pengaruh sosial yang dimiliki keluarga elite. Selain itu, kondisi tersebut juga mencerminkan strategi politik pemerintah kolonial dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi melalui kelompok perantara yang dianggap loyal.

Namun, dominasi kepemimpinan berbasis keluarga elite mulai menghadapi tantangan pada awal abad ke-20. Kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial mendorong munculnya kesadaran di kalangan masyarakat Tionghoa untuk memperjuangkan persamaan hak sebagai penduduk Hindia Belanda.⁴⁴ Munculnya kelompok intelektual Tionghoa dan masuknya pengaruh nasionalisme Tiongkok melalui hubungan perdagangan internasional turut mempercepat perubahan tersebut. Dalam konteks Surabaya, Mayor The Toan Ing dikenal sebagai salah satu opsir yang memiliki pandangan lebih

³⁹ Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942: A History of Chinese Establishment in Colonial Society* (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 77.

⁴⁰ S. Margana, *Pujangga Jawa dan Bayang-bayang Kolonial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 133.

⁴¹ Steve Haryono, *op. cit.*, hlm. 28.

⁴² Chen Menghong, *De Chinese Gemeenschap van Batavia 1843-1865: Een Onderzoek naar het Kong Koan-archief (studies in Overseas History)* (Leiden: Leiden University Press, 2011), hlm. 18-21.

⁴³ Dalam surat kabar pemerintah tidak menyetujui salah satu calon karena dianggap tidak cukup "pantas". Penilaian ini bukan karena

persoalan pribadi, melainkan karena calon tersebut tidak berasal dari keluarga yang secara turun-temurun dikenal sebagai bagian dari golongan opsir Tionghoa lihat "Soerabaja Nieuw Chineesch Bestuur" *De Locomotief*, 2 Juni 1906, hlm. 2. Dapat diartikan bahwa latar belakang keluarga dan garis keturunan masih menjadi pertimbangan penting dalam pengangkatan pejabat Tionghoa.

⁴⁴ Protes orang-orang Tionghoa di Surabaya terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1914, lihat "Hendri Borel en de Chinezen" *De Expres*, 28 Maret 1914, hlm. 6.

modern dan terpengaruh oleh gagasan nasionalisme Tiongkok. Keterlibatan sebagian opsir dalam berbagai organisasi dan pergerakan Tionghoa menunjukkan adanya upaya mempertahankan pengaruh mereka sebagai pemimpin komunitas di tengah menurunnya legitimasi sistem opsir. Penurunan tersebut terjadi karena sebagian masyarakat Tionghoa mulai menilai bahwa para opsir lebih dekat dengan kepentingan pemerintah kolonial dan elite ekonomi dibandingkan kepentingan komunitasnya sendiri. Kondisi tersebut terlihat dalam peristiwa boikot terhadap *Handelsvereniging Amsterdam* (H.V.A.) pada tahun 1903, ketika opsir Tionghoa tidak secara terbuka mendukung gerakan boikot karena mempertimbangkan hubungan ekonomi mereka dengan perusahaan kolonial.⁴⁵ Sikap tersebut memperkuat anggapan bahwa opsir lebih berpihak pada kepentingan kolonial dibandingkan aspirasi masyarakat Tionghoa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan opsir Tionghoa mulai mengalami tantangan internal pada awal abad ke-20.⁴⁶ Perubahan kesadaran sosial akibat ketidakpuasan kepada pemimpin komunitas di kalangan masyarakat Tionghoa memunculkan wacana penghapusan jabatan opsir Tionghoa.

4. Perkumpulan Internal sebagai Wadah Interaksi Sosial dan Solidaritas Tionghoa

Selain melalui perkawinan antarkeluarga, interaksi sosial masyarakat Tionghoa pada masa kolonial juga terjalin melalui berbagai perkumpulan internal. Perkumpulan tersebut muncul sebagai dampak dari kebijakan kolonial yang bersifat diskriminatif, terutama melalui penerapan sistem *wijkenstelsel* yang memisahkan wilayah permukiman masyarakat Tionghoa dari penduduk pribumi. Kebijakan tersebut tidak hanya membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa, tetapi juga menghambat proses asimilasi dan integrasi sosial antargolongan. Kondisi ini mendorong masyarakat Tionghoa membangun kehidupan sosial yang lebih berorientasi pada komunitasnya sendiri.

Perkumpulan internal kemudian berkembang sebagai sarana untuk mempertahankan identitas sosial dan budaya masyarakat Tionghoa di tengah struktur masyarakat kolonial. Kehidupan sosial yang berpusat di kawasan pecinan menyebabkan masyarakat Tionghoa lebih banyak berinteraksi dalam lingkungannya sendiri sehingga adat istiadat dan tradisi leluhur tetap terpelihara. Salah satu bentuk pelestarian identitas tersebut terlihat melalui keberadaan Rumah Abu atau Tjo-Tjhoë sebagai tempat penghormatan kepada leluhur. Rumah Abu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan, tetapi juga menjadi simbol kesinambungan garis keturunan dan identitas marga dalam masyarakat Tionghoa. Perkumpulan internal masyarakat Tionghoa pada dasarnya berakar pada sistem

kekerabatan dan keluarga besar. Keluarga menjadi unit sosial utama dalam kehidupan masyarakat Tionghoa, sedangkan ikatan darah dan kesamaan marga menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial antarsesama anggota komunitas. Melalui sistem kekerabatan tersebut, nilai-nilai seperti penghormatan kepada leluhur, tanggung jawab terhadap keluarga, dan kewajiban saling membantu diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, perkumpulan internal tidak hanya menjadi ruang interaksi sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempertahankan solidaritas dan identitas kolektif masyarakat Tionghoa pada masa kolonial.

Salah satu bentuk perkumpulan internal masyarakat Tionghoa di Surabaya adalah The Sie Siauww Yang Tjoh Biauww. Perkumpulan ini merupakan organisasi keluarga bermarga The yang didirikan oleh keturunan Mayor The Goan Tjing pada tahun 1883. Keberadaan perkumpulan tersebut menunjukkan kuatnya peran sistem kekerabatan dan ikatan marga dalam kehidupan sosial masyarakat Tionghoa pada masa kolonial. The Sie Siauww Yang Tjoh Biauww berakar pada sistem keluarga besar dan didirikan sebagai pelaksanaan wasiat Mayor The Goan Tjing sebelum meninggal dunia pada tahun 1851. Tujuan utama pendiriannya adalah mempertahankan identitas keluarga melalui tradisi penghormatan terhadap leluhur yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Tionghoa. Dalam konteks tersebut, Rumah Abu (Tjo-Tjhoë) tidak hanya berfungsi sebagai tempat penghormatan leluhur, tetapi juga menjadi simbol kesinambungan garis keturunan serta pusat aktivitas perkumpulan keluarga. Melalui perkumpulan ini, hubungan antarketurunan marga The tetap terpelihara dalam suatu ikatan kekerabatan yang terstruktur.



Pendiri The Sie Siauww Yang Tjoh Biauww
Sumber: Ing Yang Sie Tiek, *The Sie Siauww Yang Tjoh Biauww, Boekoe-Peringeten*

Struktur kepengurusan dan aktivitas awal perkumpulan The Sie Siauww Yang Tjoh Biauww menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah kekerabatan keluarga, tetapi juga sebagai sarana pelestarian tradisi dan identitas keluarga The di Surabaya. Perkumpulan ini didirikan oleh empat putra Mayor The Goan Tjing, yaitu The Boen Hie, The Boen Khe, The Boen Khing, dan The Boen Tiong. Secara resmi, perkumpulan tersebut tercatat dalam akta pendirian yang

⁴⁵ "De boyoot in Soerabaia" *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, 23 Februari 1903, hlm. 3.

⁴⁶ Persidangan kasus tersebut berhasil dimenangkan oleh saudagar-saudagar Tionghoa tanpa dukungan dari pemimpin komunitas

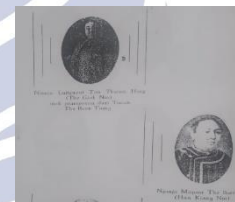
mereka, lihat "Zitting van den gemeenterad" *Soerabaiasch Handelsblad*, 23 April 1907, hlm. 5.

dibuat pada 13 November 1883 di hadapan notaris Adriaan Isaac Snouck Hurgronje di Surabaya. Perkumpulan ini kemudian memperoleh pengesahan badan hukum melalui Surat Keputusan Pemerintah No. 96 tanggal 9 Juli 1884 pada masa Residen F. Beyerinck dan Bupati Adipati Tjokronegoro IV. Pada periode tersebut, jabatan Mayor Tionghoa Surabaya dipegang oleh The Boen Khe.⁴⁷ Keberadaan para pendiri yang berasal dari satu keluarga menunjukkan bahwa keluarga The memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan jaringan sosial internal komunitas Tionghoa. Melalui pembentukan perkumpulan keluarga, hubungan kekerabatan tidak hanya dipelihara dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga dikembangkan menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, menjaga identitas keluarga, serta mempererat hubungan antaranggota marga The di Surabaya.

Struktur kepengurusan awal perkumpulan terdiri atas Kapiten The Boen Hie sebagai ketua, Mayor The Boen Khe dan The Boen Tiong sebagai komisaris, serta Letnan The Boen Khing sebagai sekretaris dan bendahara. Susunan kepengurusan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi berada dalam lingkup keluarga inti sehingga kontrol organisasi tetap berada dalam garis keturunan keluarga The. Dalam akta pendiriannya dijelaskan bahwa tujuan utama perkumpulan ialah menghimpun dana bagi kepentingan keturunan dan sanak saudara The Goan Tjing. Dana tersebut digunakan untuk perawatan makam keluarga, pembiayaan Rumah Abu keluarga The di Surabaya, serta penyelenggaraan upacara penghormatan kepada leluhur. Seluruh dana yang terkumpul berasal dari kontribusi keluarga keturunan The Goan Tjing dan dikelola sebagai milik bersama.⁴⁸

Pada masa awal perkembangannya, perkumpulan membeli sebidang tanah di kawasan Pecinan Kulon yang kini berada di Jalan Karet untuk mendirikan Rumah Abu (Tjo-Tjhoe) atau rumah sembahyang keluarga. Rumah Abu tersebut kemudian menjadi pusat kegiatan perkumpulan sekaligus simbol identitas kekerabatan keluarga The. Pada tahun 1884, sinci atau papan arwah pertama mulai ditempatkan di Rumah Abu tersebut, sementara biaya penyelenggaraan upacara sembahyang ditanggung oleh para pengurus perkumpulan. Selain itu, rumah milik The Boen Hie di kawasan Kembang Jepun yang sebelumnya digunakan sebagai istal kuda kemudian diubah menjadi rumah tinggal dengan biaya yang berasal dari pabrik gula milik keluarga The hingga akhirnya menjadi aset milik perkumpulan. Pada periode awal berdirinya, yaitu antara tahun 1883 hingga 1889, jumlah anggota perkumpulan masih terbatas pada keluarga inti dan kerabat dekat. Setiap pertemuan keluarga dilakukan dengan mengundang anggota keluarga besar untuk memperkuat hubungan kekerabatan dan menjaga kesinambungan tradisi keluarga.

Perkembangan The Sie Siauw Yang Tjoh Biauw menunjukkan adanya dinamika organisasi yang terus berlangsung sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Setelah meninggalnya The Boen Hie pada tahun 1889, struktur kepengurusan mulai mengalami perubahan dengan pengangkatan The Boen Khe sebagai ketua, dibantu The Toan Tjiak sebagai seker serta The Boen Khing dan Tan Thwan Hing sebagai komisaris. Pada tahun yang sama, susunan kepengurusan kembali berubah dengan diangkatnya The Toan Lok sebagai ketua, Tan Thwan Hing sebagai sekretaris dan bendahara, serta The Toan Tjiak dan The Toan Tjiang sebagai komisaris. Perubahan kepengurusan terus berlangsung hingga tahun 1910 ketika Mayor The Toan Ing diangkat sebagai ketua menggantikan The Toan Lok yang meninggal dunia. Pergantian pengurus tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi tetap berada dalam lingkup keluarga besar marga The dan melibatkan generasi berikutnya. Dalam perkembangannya, jumlah anggota perkumpulan juga semakin meningkat sehingga aktivitas organisasi menjadi lebih terstruktur, terutama dalam pengelolaan Rumah Abu, pemakaman keluarga, dan pelaksanaan upacara penghormatan leluhur.



Nyonya The Giok dan Nyonya Han Kiang Nio
Sumber: Ing Yang Sie Tiek, *The Sie Siauw Yang Tjohbiauw, Boekoe-Peringeten*

Perkembangan organisasi turut memengaruhi kondisi keuangan perkumpulan. Dana perkumpulan semakin bertambah melalui sumbangan dari anggota keluarga dan elite keluarga The. Beberapa tokoh keluarga seperti The Giok Nio, Han Kiang Nio, Tan Thwan Hing, dan Mayor The Toan Ing tercatat memberikan sumbangan dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan perkumpulan. Dana tersebut digunakan untuk perawatan Rumah Abu, pembelian tanah pemakaman, renovasi bangunan, serta pelaksanaan kegiatan sembahyang leluhur.⁴⁹ Pada tahun 1915, perkumpulan juga membeli rumah di kawasan Pecinan Kulon yang terletak di samping Rumah Abu keluarga The. Selain itu, perkumpulan menerima sumbangan dana sebesar f 10.000 dari N.V. *Suikerfabriek "Tjandie"* yang berkaitan dengan keluarga The. Besarnya dukungan dana tersebut menunjukkan kuatnya solidaritas internal keluarga dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi dan tradisi leluhur. Keterlibatan anggota keluarga dalam mendukung aktivitas perkumpulan tidak hanya dilakukan oleh tokoh laki-laki yang menduduki jabatan penting, tetapi juga oleh

⁴⁷ Laksana Tedja, *Rumah Sembahyang "The Goan Tjing (The Sie Siauw Yang TjohBiauw) Surabaya 1883-2001* (Surabaya: Tanpa Penerbit, 2001), hlm. 42.

⁴⁸ Ing Yang Sie Tik, *The Sie Sauw Yang Tjohbiauw 1883-1939 Boeko-Peringeten* (Surabaya: Tanpa Penerbit, 1939), hlm. 41.

⁴⁹ Pemberian sumbangan ini menjadi bukti nyata adanya kepedulian sosial serta ikatan primordial yang mendalam di antara keturunan Mayor The Goan Tjing. Solidaritas tersebut tumbuh dari hubungan kekerabatan yang sangat kuat di dalam lingkaran internal keluarga besar mereka lihat Bima Satria Utama, Bima Satria Utama, *Marga The: Keluarga Tionghoa Terkemuka di Surabaya Pada Masa Kolonial* (Surabaya: Skripsi Unair, 2020), hlm. 39.

anggota keluarga perempuan. Kehadiran The Giok Nio dan Han Kiang Nio dalam daftar penyumbang menunjukkan bahwa perempuan turut berperan dalam menjaga keberlangsungan organisasi keluarga melalui dukungan material maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial-keagamaan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.

The Sie Siauww Yang Tjoh Biauww tidak hanya berperan sebagai organisasi keluarga yang mengelola Rumah Abu dan pemakaman leluhur, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial internal masyarakat Tionghoa di Surabaya. Keberadaan perkumpulan ini menunjukkan bahwa marga dan keluarga besar berfungsi sebagai dasar pembentukan solidaritas sosial di tengah kebijakan kolonial yang menciptakan segregasi ruang melalui sistem *wijkenstelsel*. Melalui perkumpulan tersebut, hubungan kekerabatan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dilembagakan secara lebih terstruktur melalui pembentukan kepengurusan, aturan keanggotaan, dan pengelolaan dana bersama sebagai sarana penting dalam mempertahankan identitas keluarga secara turun-temurun. Pengelolaan Rumah Abu, pelaksanaan sembahyang leluhur, dan perawatan makam keluarga tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas internal masyarakat Tionghoa di tengah keterbatasan ruang interaksi sosial pada masa kolonial. Dengan demikian, perkumpulan ini dapat dipahami sebagai bentuk organisasi kekerabatan yang berperan dalam mempertahankan identitas sosial masyarakat Tionghoa di Surabaya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan kebijakan *wijkenstelsel* di Surabaya pada tahun 1843–1918 memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Tionghoa dalam berbagai aspek. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari sistem pemerintahan kolonial yang membagi penduduk berdasarkan kategori rasial, seperti golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Dalam sistem tersebut, masyarakat Tionghoa ditempatkan di kawasan permukiman khusus yang berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial melalui opsir Tionghoa. Pengawasan tersebut diperkuat melalui penerapan *passenstelsel* yang membatasi mobilitas masyarakat Tionghoa di luar kawasan pecinan. Dengan demikian, *wijkenstelsel* tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan penataan ruang kota, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial dalam struktur masyarakat kolonial.

Pemusatan permukiman masyarakat Tionghoa di kawasan pecinan Surabaya, seperti Kapasan, Kembang Jepun, Bibis, dan Bongkaran, menyebabkan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan berkembang dalam lingkungan komunitas yang relatif homogen. Pembatasan interaksi antargolongan justru mendorong terbentuknya solidaritas internal yang lebih kuat di kalangan masyarakat Tionghoa. Kondisi tersebut terlihat melalui penguatan hubungan kekerabatan dan peran keluarga besar, khususnya keluarga Han, The, dan Tjoa, dalam membangun jaringan sosial, ekonomi, dan politik. Perkawinan antarkeluarga elite, keterlibatan dalam perdagangan dan industri gula, serta penguasaan jabatan

opsir Tionghoa menunjukkan bahwa keluarga besar menjadi sarana penting dalam mempertahankan posisi sosial di tengah struktur kolonial.

Selain itu, keberadaan organisasi keluarga seperti The Sie Siauww Yang Tjoh Biauww menunjukkan bahwa perkumpulan internal memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Tionghoa. Perkumpulan tersebut tidak hanya berfungsi mengelola Rumah Abu dan pemakaman leluhur, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan kekerabatan, mengatur keanggotaan, serta mengelola dana bersama. Meskipun dalam perkembangannya muncul berbagai konflik internal terkait kepengurusan dan pengelolaan keuangan, keberadaan perkumpulan tersebut tetap menunjukkan pentingnya marga dan keluarga besar sebagai dasar pembentukan solidaritas sosial masyarakat Tionghoa. Dengan demikian, penerapan *wijkenstelsel* di Surabaya tidak hanya membentuk segregasi ruang dalam struktur kota kolonial, tetapi juga memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat Tionghoa. Pembatasan ruang dan pengawasan sosial yang diterapkan pemerintah kolonial mendorong masyarakat Tionghoa membangun solidaritas internal melalui penguatan keluarga besar, marga, dan organisasi kekerabatan sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem kolonial hingga penghapusan *wijkenstelsel* pada tahun 1918.

B. Saran

Penelitian mengenai kebijakan *wijkenstelsel* dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Tionghoa di Surabaya masih dapat dikembangkan lebih lanjut melalui kajian yang lebih luas terhadap berbagai marga dan kelompok sosial Tionghoa lainnya. Pembahasan yang tidak hanya terfokus pada keluarga Han, The, dan Tjoa diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika kehidupan masyarakat Tionghoa pada masa kolonial. Selain itu, penggunaan sumber yang lebih beragam, seperti arsip kolonial, surat kabar, dan dokumen keluarga, dapat memperkuat analisis mengenai pengaruh kebijakan kolonial terhadap pola interaksi sosial masyarakat Tionghoa.

Kajian ini menunjukkan bahwa *wijkenstelsel* tidak hanya berpengaruh terhadap pembentukan tata ruang kota kolonial, tetapi juga memengaruhi terbentuknya solidaritas internal masyarakat Tionghoa melalui penguatan hubungan kekerabatan, marga, dan organisasi keluarga. Oleh karena itu, penelitian mengenai sejarah sosial masyarakat Tionghoa di Surabaya masih memiliki peluang untuk terus dikembangkan guna memperkaya kajian sejarah sosial pada masa kolonial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip/Dokumen

- Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 37 Tahun 1835.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 56 Tahun 1866.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 57 Tahun 1866.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 145 Tahun 1871.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 146 Tahun 1871.

B. Surat Kabar dan Majalah

- De Expres*, tanggal 28 Maret 1914.
De Locomotief, tanggal 2 Juni 1906.
De Nieuws van den Dag Naderlandsch-Indie, tanggal 30 Desember 1939.
Het Koloniaal Weekblad Orgaan Der Vereeniging Oost En West, tanggal 26 Februari 1914 dan 7 Februari 1918.
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, tanggal 23 Februari 1903.
Het Vaderland, tanggal 29 Desember 1910.
Indie Jrg 1, tanggal 13 Juni 1917.
Koloniaal Tijdschrift Jrg 6, tanggal 1 Januari 1917.
Matahari, tanggal 1 Agustus 1934
Soerabaiasch Handelsblad, tanggal 23 April 1907
- C. Jurnal dan Penelitian
- Baskoro, S. (2017). Surabaya Sebagai Kota Kolonial Modern Pada Akhir Abad Ke-19: Industri, Transportasi, Permukiman, Dan Kemajemukan Masyarakat (Surabaya as Modern Colonial City at the End of 19th Century: Industry, Transportation, Settlement, and Pluralism Society). *Mozaik Humaniora*, 17(1), 157-180.
- Hutama, Bima Satria. (2020). *Marga The: Keluarga Tionghoa Terkemuka di Surabaya Pada Masa Kolonial* (Skripsi, Universitas Airlangga).
- D. Buku
- Andjarwati, Noordjanah. (2010). *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Ombak.
- Basundoro, P. (2012). *Pengantar sejarah kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Basundoro, P., & Sofansyah, D. Y. (2024). *Tempat-Tempat Bersejarah di Kota Surabaya*. Surabaya: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.
- Dick, H. W. (2002). *Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900–2000*. Athens: Ohio University Press.
- Faber, G.H. von. (1931). *Oud Soerabaia De Geschiedenis van Indië's Eerste Koopstad van de Oudste Tijden tot de Instelling der Gemeente*. Soerabaia: Gemeente Soerabaia.
- Ham, O. H. (1983). *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ham, O. H. (2008). *Anti Cina, kapitalisme Cina, dan gerakan Cina: sejarah etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ham, O. H. (2017). *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Handinoto. (1996). *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870- 1940*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Handinoto. (2015). *Komunitas Cina dan Perkembangan Kota Surabaya: Abad XVIII sampai Pertengahan Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Hariyono, P. (1994). *Kultur Cina dan Jawa : pemahaman menuju asimilasi kultural*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Haryono, Steve. (2017). *Perkawinan Strategis Hubungan Keluarga antara. Opsir-opsir Tionghoa dan 'Cabang Atas' di Jawa pada Abad ke-19 dan 20*. Rotterdam: Steve Haryono.
- Hong-Sien, Kwee. (2023). *History of the han, kwee, and the families from Pasuruan and Surabaya*. Kwee Publication.
- Ing Yang Sie Tik. (1939). *The Sie Sauw Yang Tjobiauw 1883-1939 Boeko-Peringeten*. Surabaya: Tanpa Penerbit.
- ISR, Shinta Devi. 2014. *Etnis Tionghoa dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat*. Kota Surabaya. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lohanda, Mona. (2007). *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Lohanda, Mona. (1994). *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942: A History of Chinese Establishment in Colonial Society*. Jakarta: Djambatan.
- Lombard, D. (2000). *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jilid II. Jakarta: Gramedia.
- Margana, S. (2004). *Pujangga Jawa dan Bayang - Bayang Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Menghong, Chen. (2011). *De Chinese Gemeenschap van Batavia, 1843-1865: Een Onderzoek naar het Kong Koan-archief (studies in Overseas History)*. Leiden: Leiden University Press.
- Suryadinata, L. (1997). *Political Thinking of the Indonesian Chinese, 1900-1995: A Sourcebook*. Singapura: Singapore University Press.
- Tedja, Laksana. (2001). *Rumah Sembahyang "The Goan Tjing (The Sie Siauww Yang Tjohbiauw) Surabaya 1883-2001*. Surabaya: Tanpa penerbit.